



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua

Masyarakat Kabupaten Kepahiang yang Saya Hormati

Puji dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sesuai amanat Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dirangkum dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Ringkasan LPPD ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kepahiang pada

Tahun Anggaran 2022, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna sebagai bahan perbaikan program kerja dan peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kepahiang yang telah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun Kabupaten Kepahiang dan Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepahiang.

1. LATAR BELAKANG

1.1 PENJELASAN UMUM

A. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.

B. DATA GEORAFIS WILAYAH

Secara astronomi Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi $101^{\circ}55'19''$ sampai dengan $103^{\circ}01'29''$ Bujur Timur (BT) dan $02^{\circ}43'07''$ sampai dengan $03^{\circ}46'48''$ Lintang Selatan (LS) yang terletak pada dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kepahiang memiliki batas - batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah (Pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatra Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan bukit barisan yang sebagian besar daerahnya berada pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan air laut (dpl). Memiliki relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan yang cukup tajam dan curam (diatas 40%) terutama yang termasuk Jalur pegunungan Bukit Barisan.

Luas wilayah Kabupaten kepahiang \pm 66.500 Ha yang terdiri dari 8 Kecamatan, 105 Desa dan 12 Kelurahan yaitu:

- Kecamatan Muara Kemumu terdiri 8 Desa;
- Kecamatan Bermani Ilir terdiri dari 18 desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Seberang Musi terdiri 13 desa;
- Kecamatan Tebat Karai terdiri 13 desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Kepahiang terdiri 16 desa dan 7 kelurahan;
- Kecamatan Ujan Mas terdiri 16 Desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Merigi terdiri 7 desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Kabawetan terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan.

C. JUMLAH PENDUDUK

Berdasarkan hasil Data Konsolidasi Bersih (DBK) Semester II Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Kepahiang Semester II Tahun 2022 yaitu sebanyak 153.548 jiwa. yang tersebar di 8 kecamatan. Penduduk Kecamatan Bermani Ilir mencapai 15.565 Jiwa, Kecamatan Ujan Mas 24.427 jiwa, Kecamatan Tebat Karai 15.241 jiwa, Kecamatan Kepahiang 52.169 jiwa, Kecamatan Merigi 11.765 jiwa, Kecamatan Kabawetan 13.679 jiwa, Kecamatan Seberang Musi 8.080 jiwa dan Kecamatan Muara Kemumu 12.626 jiwa. Penyebaran penduduk di Kabupaten Kepahiang per Kecamatan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Kependudukan Semester II Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Kabupaten Kepahiang		79.213	74.335	153.548
1.	Bermani Ilir	8.101	7.464	15.505
2.	Ujan Mas	12.579	11.844	24.423
3.	Tebat Karai	7.878	7.363	15.241
4.	Kepahiang	26.726	25.443	52.169
5.	Merigi	6.041	5.724	11.765
6.	Kabawetan	7.073	6.606	13.678
7.	Seberang Musi	4.272	3.808	8.080
8.	Muara Kemumu	6.543	6.083	12.626

Sumber data : Konsolidasi Bersih (DKB) Sem.2 tahun 2022

D. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2022 dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 terdiri dari :

1. SEKRETARIAT DAERAH;
2. SEKRETARIAT DPRD;
3. INSPEKTORAT DAERAH;
4. DINAS DAERAH terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;
 - d. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Pertanian;

- i. Dinas Kesehatan;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - l. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - m. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - q. Dinas Perhubungan;
 - r. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - s. RSUD.
5. BADAN DAERAH :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Keuangan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. KECAMATAN :
- a. Kecamatan Kepahiang;
 - b. Kecamatan Merigi;
 - c. Kecamatan Ujan Mas;
 - d. Kecamatan Kabawetan;
 - e. Kecamatan Tebat Karai;
 - f. Kecamatan Seberang Musi;
 - g. Kecamatan Bermani Ilir;
 - h. Kecamatan Muara Kemumu;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2022 berjumlah 2.872 orang dengan komposisi PNS berjumlah 2.821 orang (98,22%) dan PPPK berjumlah 51 orang (1,78%). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, ASN Perempuan berjumlah 1.707 orang (59,43%) lebih dominan dari PNS Laki-laki berjumlah 1.165 orang (40,57%).

1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026

Gambaran umum Kabupaten Kepahiang dilihat pada capaian pembangunan lima tahun sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa capaian pembangunan Kabupaten Kepahiang yang masih harus di tingkatkan terutama terkait dengan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan layanan umum lainnya. Serta indikator makro lainnya seperti tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata domestik bruto dan angka kemiskinan yang masih harus diperbaiki, secara umum isu-isu strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan;
2. Masih belum berkualitas tata kelola pemerintahan dan pemerintahan desa, dan belum efektifnya reformasi birokrasi;
3. Masih terbatasnya infrastruktur, tingginya risiko bencana dan belum optimalnya pengendalian dan pelestarian lingkungan;
4. Belum terwujudnya kemajuan dan transformasi struktural perekonomian daerah.

B. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Kepahiang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun 2021-2026 yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”**.

2. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kepahiang Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Tahun		
		2021	2022	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,62	69,09	0,68
2.	Angka Kemiskinan (%)	14,83	14,53	-2.02
3.	Angka Pengangguran (%)	1,89	2,92	54,50
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,16	4,15	32,59
5.	Pendapatan Perkapita (Juta)	19,09	33,51	7,03
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,275	0,295	7,27

Sumber data: BPS Kabupaten Kepahiang 2023

Di lihat dari capaian kinerja makro di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia meningkat 0,68%, angka kemiskinan menurun sebesar -2,02%, angka pengangguran meningkat sebesar 54,50%, pendapatan perkapita meningkat sebesar 7,03% sementara Gini Rasio meningkat 7,27%.

3. CAPAIAN KINERJA KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Ringkasan capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	Data LPPD		Sumber Data
					Elemen data	Capaian Kinerja	
1	Pendidikan	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	3.971	78,51	DIKBUD
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	5.058		CAPIL
		1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	15.754	98,66	DIKBUD
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	15.968		CAPIL

		1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	6.594	82,11	DIKBUD		
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	8.031				
		1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	355	15,93	DIKBUD		
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	2.229		DIKBUD		
		2	Kesehatan	1.b.1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten	368	0,24	RSUD /DINAS KESEHATAN
						Jumlah Penduduk kabupaten	153.548		CAPIL
				1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi	1	100,00	RSUD
						Jumlah RS kabupaten	1		RSUD
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.951	74,55	DINKES		
				Jumlah ibu hamil di kabupaten	2.617				
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	2.025	81,06	DINKES		
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten	2.498				
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	1.917	80,58	DINKES		

		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten	2.379		
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	7.477	81,54	DINKES
		Jumlah balita di kabupaten	9.170		
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	20.416	99,17	DINKES
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten	20.586		
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	83.176	88,47	DINKES
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten	94.020		
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	10.020	68,66	DINKES
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten	14.594		
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16.594	54,37	DINKES
		Jumlah penderita hipertensi di kabupaten	30.521		
1.b.11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	928	77,66	DINKES
		Jumlah penderita DM di kabupaten	1.195		

		1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	213	99,07	DINKES		
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten	215				
		1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.780	77,16	DINKES		
				Jumlah penderita TBC di kabupaten	4.899				
		1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	2.226	71,76	DINKES		
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten	3.102				
		3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	20	0,19	
						Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten (ha)	10676		
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	1	100,00			
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (ha)	1				
1.c.3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi			Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	0	0,00			

		Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	3765		
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	44.480	90,42	
		Jumlah total Proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.	49.194		
1.c.5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	40408	98,67	
		Jumlah rumah di Kabupaten	40951		
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	2504	90,53	
		Jumlah IMB yang berlaku	2766		
1.c.7	Rasio kemandapan jalan	Jumlah Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	262,38	51,30	
		Jumlah Total Panjang jalan kabupaten	511,49		
1.c.8.1	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Operator dan teknis atau analis	40	11,11	
		Jumlah kebutuhan tenaga Operator dan teknis/analis di wilayah kabupaten/Kota	360		
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	18	100,00	

			kontruksi	Jumlah Total Proyek menjadi kewenangan pengawasannya	18		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.d.1	hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	1	100,00	
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	1		
		1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	1	100,00	
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	1		
		1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	1	100,00	
				Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha	1		
		1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	2649	6,47	
				Jumlah total unit rumah Kabupaten	40951		
		1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	67	0,16	
				Jumlah unit rumah kab/kota	40951		
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	273	96,81	
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	282		
		1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	9	69,23	

		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	13		
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	114942	100,00	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	114942		
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	114942	100,00	
		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	114942		
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	338	100,00	
		Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	338		
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	20	100,00	
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten	20		
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari laporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	62	62,00	

6	Sosial	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	775	10,25	
			Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	7558		
		1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten /kota	112	98,25	
			Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	114		

4. HASIL EVALUASI PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN

4.1 EVALUASI PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) TAHUN SEBELUMNYA

Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2022 atas LPPD tahun 2021 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/3955/OTDA tanggal 8 Juni 2022 hal : Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022.

Untuk hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepahiang tahun 2021, hingga ditayangkannya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 ini belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

4.2 OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang Lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021. Dari hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 diberikan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** yang dimuat dalam Laporan hasil Pemeriksaan Nomor 11.A/LHP/XVIII.BKL/05/2022 tanggal 12 Mei 2022.

5. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

4.1. Ringkasan Realisasi Penerimaan

Ringkasan realisasi penerimaan daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel 5.1 sebagai Berikut:

Tabl 5.1

Ringkasan Realisasi Penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN/ TARGET 2022	REALISASI 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.600.256.047,00	20.600.756.046,97	499.999,97
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.600.256.047,00	20.600.256.046,97	(0,03)
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	500.000,00	500.000,00
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.238.395.000,00	11.238.395.000,00	11.238.395.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.238.395.000,00	11.238.395.000,00	11.238.395.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		9.361.861.047,00	9.362.361.046,97	499.999,97

5. INOVASI DAERAH

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan daya saing daerah, banyak inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang antara lain sebagai berikut:

Tabel 6.1
INOVASI DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

NO.	OPD	INOVASI
1.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	WARUNG POJOK (Way Riang Uku Ngurus Delai Dapet Tojoak Artinya Senangnya Aku Membuat 1 Dapay 7)
		AMI ALEW AU (Awak Meneh Delai Dapet Telew Au Artinya Kamu Buat 1 Dapat 3 ya)
		SI PETI MANTAP (Sistem Pelayanan Terintegrasi Lima Tahapan)
		PKS SI ADEL (Perjanjian Kerjasama Siap Delivery)
		PERAWAT 1708 (Pelayanan Masyarakat Via WhatsApp Kabupaten Kepahiang)
		SEHATI PADAKU (Semua Harus Tertib Administrasi Penduduk Akan Mendapat Keberuntungan)
2.	BADAN KEUANGAN DAERAH	Pelayanan Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Secara Online (Online Payment System) Melalui Aplikasi "Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang"
		Pembayaran Pajak Daerah Melalui Virtual Account BRI
3.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANTAR PIALA (Pengantaran Langsung Piagam Satyalencana)
4.	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENGEMBANGAN BUDIDAYA TANAMAN PENAHAN LONGSOR (VETIVER) DI KABUPATEN KEPAHIANG
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	MEJA TEMA (Media Pembelajaran Menggunakan Teknologi Animas)
		Belajar Tik-Tok (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif)
6.	DINAS KESEHATAN	KADER TANGGUH (TANGGAP DAN SUNGGUH) UNTUK MENUJU HIDUP SEHAT DENGAN BINA KELUARGA
		MBAK RESTI (Monitoring Berkala Ibu Hamil Risiko Tinggi)
8.	DINAS PERIKANAN KETAHANAN PANGAN	PERAN CANDA (Percepatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah)
		Budi Cara Kami (Budidaya Cacing Sutra Pakan Alami)
9.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SEPUTARAN (Sistem Perizinan Berusaha Tanpa Bayaran)
		SIALEP (SISTEM ANTAR LENGKAP PERIZINAN)
		SITUNJANG MANIS (Sistem Informasi

		Pemberitahuan Perpanjangan Masa Berlaku Izin Usaha)
		PENYULUH (Pendampingan Penyusunan Laporan Usaha)
		SIPPEKAT (SISTEM PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT)
10.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	SIKADA (Sistem Kerjasama Media)
11.	SEKRETARIAT DPRD	REJA ASMARA (RESES MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPAHANG
12.	INSPEKTORAT	Pengaduan Masyarakat (Dumas) " LAPOR SIKO"
13.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	MALL IKM KEPAHANG
14.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	INOVASI DIGITAL LIBERARY PERPUSTAKAAN
		Website perpustakaan tempat masyarakat berkarya dan memperoleh informasi
15.	DINAS PERTANIAN	TEKNIK KOPI SAMBUNG UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOPI ROBUSTA KEPAHANG
		AGROWISATA KAMPOENG KOPI SEBAGAI WISATA BERBASIS PERTANIAN DI KABUPATEN KEPAHANG
16.	Rumah Sakit Umum Daerah	Ruang Rawat Inap COVID-19
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan kebakaran via whatsapp (WA)
18.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SISWA (Sistem Pelaporan Peristiwa Via WA)
19.	Dinas Sosial	LAYANAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KEPAHANG (LINKS-KPH)
		Layanan Konseling Psikologi

6. PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pemerintah daerah baik mikro maupun makro dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan mewujudkan visi serta misi Kabupaten Kepahiang yaitu “**Maju Mandiri Sejahtera dan Berdaya Saing**” yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Akhir kata, semoga Laporan ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan kemajuan pembangunan Kabupaten Kepahiang pada umumnya serta dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Kabupaten Kepahiang pada khususnya.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir batin dan petunjuk kepada Kita.

Sekian dan terima Kasih
Wassalamualaikum Wr.Wb

Kepahiang, 11 April 2023



[Handwritten signature]
H. H. Hidayattullah Sjahid, MM